

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) Pada Sektor Pemerintahan

Frida Fanani Rohma¹

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

Abstract: Budgeting is one of the control mechanisms used by organizations. Technological developments are increasingly massive, pushing the budgeting mechanism to start being carried out on a technology basis, namely using e-budgeting. The electronic budgeting mechanism is crucial because, in the era of digitalization, people are more demanding and open about information. This research is a literature review with the technique of charting the field, which originates from scientific journal articles adapted to the topic of research discussion. The results indicate that the implementation policy of e-budgeting is an alternative that can promote transparency and accountability during budgeting, which can boost public trust. E-budgeting also has the potential to minimize information asymmetry because it can encourage budgetary participation. Moreover, e-budgeting can be a means of two-sided monitoring from internal and external to form better governance.

Keywords: Accountability, Budgeting, Information Asymmetry, Technology, Transparency.

Abstrak: Penganggaran merupakan salah satu mekanisme pengendalian bagi organisasi. Perkembangan teknologi yang semakin massif mendorong mekanisme penganggaran mulai dilakukan dengan basis teknologi yaitu e-budgeting. Mekanisme penganggaran elektronik menjadi bagian krusial karena pada era digitalisasi masyarakat lebih menuntut adanya keterbukaan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur dengan teknik charting the field yang bersumber pada artikel jurnal ilmiah yang disesuaikan dengan topik bahasan penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penerapan e-budgeting dalam proses penganggaran merupakan alternatif yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas yang berpotensi mendorong kepercayaan publik. E-budgeting berpotensi meminimalkan terjadinya asimetri informasi dan dapat mendorong terjadinya partisipasi anggaran. Lebih dari itu, penerapan e-budgeting dapat menjadi sarana pengawasan dua sisi dari internal dan eksternal untuk membentuk sistem tata kelola yang lebih baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Asimetri Informasi, Anggaran Elektronik, Teknologi, Transparansi.

¹ Corresponding author's email: frida.frohma@trunojoyo.ac.id

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan**Pendahuluan**

Perkembangan teknologi yang semakin massif mendorong organisasi untuk mulai melaksanakan aktivitasnya dengan menggunakan perkembangan teknologi (Rohma & Zakiyah, 2022). Pelaksanaan aktivitas dengan melibatkan teknologi diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan transparansi karena adanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara luas. Tuntutan akan keterbukaan informasi publik menjadi sangat krusial sejak diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi yang berkaitan dengan badan publik merupakan informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan perspektif keagenan pada hubungan (Raharjo, 2007). Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa prinsipal (rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya, pemerintah daerah/ gubernur/ bupati/ walikota) sehingga sangat jelas jika pemerintah perlu untuk melaporkan pengelolaan kekayaannya kepada masyarakat dalam bentuk informasi baik keuangan maupun non keuangan guna mengukur kinerja agen sebagai bahan evaluasi oleh prinsipal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan transparan dan bertanggungjawab (akuntabel). Berbeda dengan akuntabilitas sektor swasta yang bersifat *dual-accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure* (Pohan, 2000). Proses pengelolaan keuangan baik negara maupun daerah tentu tidak terlepas dari proses penganggaran. Proses penganggaran merupakan proses yang cukup rumit dikarenakan harus dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dan dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan bersifat akuntabel (Rohma et al., 2023).

Keterlibatan masyarakat umum

merupakan sebuah cerminan penganggaran partisipatif yang melibatkan semua elemen baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, adanya teknologi informasi diharapkan dapat mendorong tercapai akuntabilitas dan transparansi. *government* pemerintah lebih cenderung melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan *paper-based administration* (Rohma, 2023).

Teknologi akan mempermudah baik *user* maupun *preparer* dalam mempersiapkan dan memperoleh informasi publik. Pemerintah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan lebih efisien dengan menggunakan teknologi (Rohma et al., 2023). Vazquez et al (2012) menjelaskan bahwa hadirnya pengelolaan elektronik di pemerintah daerah menjadi sebuah perangkat yang dapat mengurangi diskresi oleh pejabat publik mengingat teknologi akan menjadikan proses birokrasi menjadi lebih transparan, mudah, dan tidak dapat diintervensi pejabat publik. Tuntutan adanya teknologi informasi ini selaras dengan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Hardjaloka (2014), Tumpal dan Simangunsong (2015) Rohma et al (2023) menjelaskan bahwa peluang diterapkannya mekanisme pemerintahan berbasis elektronik berpotensi meningkatkan efektivitas, efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi untuk mengurangi korupsi. pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini melakukan analisis mengenai urgensi adanya mekanisme penganggaran berbasis elektronik yang dimungkinkan dapat digunakan sebagai media

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan bagi pemerintah untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan telaah pustaka dengan teknik *charting the field*.

Kajian Literatur

Pada upaya mencapai akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terdapat unsur pertanggungjawaban di dalamnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori keagenan yang mengulas hubungan antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan tanggungjawab dan pihak yang menerima tanggungjawab (Rohma, 2023; Rohma & Tyastutik, 2023). Wolk, Dodd, dan Royzycki (2013), Kusufi et al (2020) dan Rohma (2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam teori keagenan, yaitu agen adalah seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, dan organisasi sebagai sebuah “*nexus*” (persimpangan) hubungan keagenan. Berbagai pihak yang ada dalam hubungan keagenan akan berupaya memaksimalkan utilitinya masing-masing.

Pada konteks pemerintah daerah apabila pihak eksekutif sebagai pelaksana tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas kepada pihak legislatif serta mempunyai akses monopoli informasi, maka dapat terjadi *discretion* dalam pengadministrasian pertanggungjawaban sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan misalkan *mark up* atau korupsi oleh pihak agen (Mahmood 2004; Srivastava, 2016). Halim dan Abdullah (2006) menjelaskan bahwa otonomi daerah di Indonesia memiliki implikasi besar pada penggunaan perspektif teori keagenan dalam akuntansi sektor publik Hubungan teori keagenan ini dengan pelaksanaan pengungkapan informasi adalah sangat nyata, dimana pihak agen harus mengungkapkan kegiatan pengelolaan sumberdayanya kepada pihak prinsipal dalam hal ini pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.

Penganggaran memiliki peran penting dalam menjelaskan tujuan dan target

pemerintah. Akan tetapi, besarnya potensi penyimpangan yang terjadi selama penggaran (i.e: senjangan anggaran) akibat adanya asimetri informasi tidak dapat diabaikan (Rohma, 2022). Perkembangan digitalisasi dengan adanya keterbukaan informasi selama penganggaran melalui penganggaran elektronik (*e-budgeting*) dapat meminimalkan potensi penyimpangan pada kontrak keagenan selama penganggaran

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan teknik *charting the field* yaitu mengumpulkan teori, data-data penelitian atau temuan pada penelitian sebelumnya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Kajian literatur dalam hal ini dilakukan tanpa melakukan uji empiris secara spesifik, tidak diberlakukan acuan tahun hal ini karena pergerakan digitalisasi di sektor publik tidak cukup massif. Dengan demikian, adanya pembatasan dikhawatirkan tidak dapat menangkap seluruh fenomena secara komprehensif.

Penganggaran yang baik merupakan salah satu refleksi dari tata kelola yang baik pada suatu organisasi (Rohma, 2022). *The Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) menyebutkan bahwa kriteria tata kelola yang baik yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban (Agoes, 2004). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa terdapat 3 pilar yang mendorong tata kelola yang baik di pemerintah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Anggarini dan Puranta (2010) menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa kriteria dalam mendorong tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif (kesamaan hak), keseimbangan hak dan kewajiban.

Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2001; Mardiasmo, 2009). Anggaran publik merupakan ramalan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan

tahun fiskal berikutnya yang mungkin atau tidak mungkin berkorespondensi dengan tahun kalendar dan juga merefleksikan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi (Hogye, 2002).

Fungsi anggaran pada awalnya adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah otonom untuk satu periode di masa yang akan datang, namun karena sebelum anggaran publik dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat maka anggaran publik berfungsi sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah. Selain itu, karena pada akhirnya setiap anggaran publik harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat berarti anggaran negara berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya (Suparmoko, 1987).

Anggaran partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk pengaturan anggaran yang menggunakan proses pembuatan keputusan secara bersama dimana seluruh pihak sependapat mengenai pengaturan target anggaran (Atkinson, et al 2012). Pendekatan *bottom up* memungkinkan adanya partisipasi dari pelaksana anggaran untuk berperan pada proses pencapaian tujuan organisasi (Setyorini et al, 2013). Berdasarkan teori keagenan, anggaran partisipatif merupakan proses kerjasama antara agen dan prinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran daerah. Anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal.

Sari & Winarno (2012) menjelaskan bahwa perkembangan sistem informasi di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat meskipun secara kualitas belum memadai. Guna mendorong peningkatan pengembangan sistem informasi di Indonesia diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan baik dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Bastian (2003) menjelaskan bahwa guna mendorong

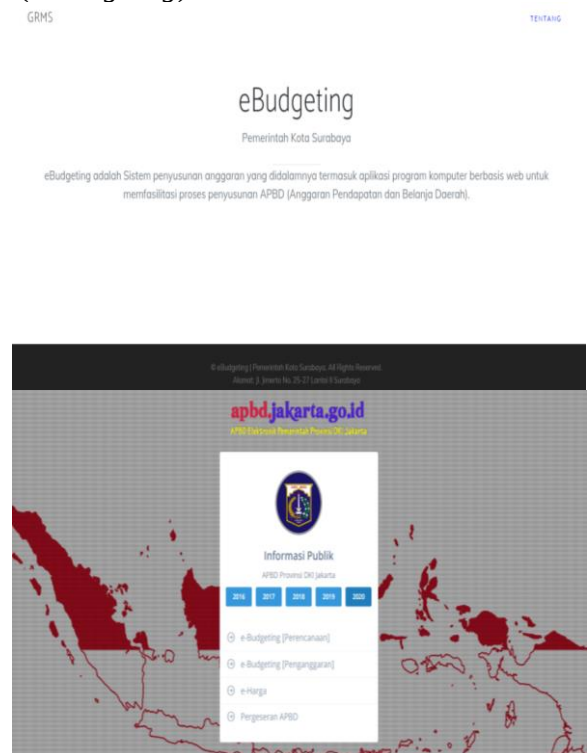
implementasi penggunaan sistem informasi di pemerintahan diperlukan beberapa tahap yaitu pemerintah mempublikasikan informasi keuangan melalui website, diharapkan adanya interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah daerah melalui e-mail, masyarakat dalam suatu kota/ kabupaten yang bersangkutan dapat melakukan transaksi dengan pemerintah secara timbal balik dan berkesinambungan, dan integrasi seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Hardjaloka (2014) menjelaskan bahwa beberapa keterbatasan implementasi sistem informasi berbasis elektronik di pemerintah yaitu minimnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan sistem elektronik, belum ada tradisi saling berbagi informasi (*no culture of sharing*), Belum adanya tradisi mendokumentasikan (*no culture of documenting*), kurangnya sumber daya manusia yang handal dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, infrastruktur yang mahal dan memadai, dan akses yang terbatas. Ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah (Sadjiarto, 2000). Padahal penganggaran di pemerintahan daerah merupakan instrumen utama atas manajemen keuangan dan realisasi tugas publik (Galinski, 2013). Hal tersebut merupakan timbul akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

Indrajit (2007) menjelaskan bahwa kriteria partisipasi dalam sistem berbasis elektronik yaitu akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui *we*, pertimbangan umpan balik dan keinginan masyarakat, pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas *chatting*, *forum*, atau *milis*). Indrajit (2007) menjelaskan bahwa sebuah negara memutuskan untuk menggunakan sistem

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan berbasis elektronik dalam penganggaran karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat salah satunya dalam penganggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan penganggaran elektronik untuk mendorong partisipasi anggaran dan meningkatkan transparansi.

Adanya sistem penganggaran berbasis elektronik membuat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah dapat dibuat menjadi lebih interaktif melalui *e-government* dengan menambah kolom permintaan pertanyaan dan pemberian akses untuk memberikan evaluasi dari masyarakat (Rohma et al., 2023). Masyarakat akan merasa menjadi sebuah pihak yang lebih memiliki porsi dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah melalui partisipasi anggaran daerah (Nofianti & Suseno, 2014). Gambar 1 merupakan contoh penerapan *e-budgeting* yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang telah menjalankan program sistem elektronik. Melalui penerapan *e-budgeting* pemerintah daerah dapat melaksanakan ketiga prinsip *good governance* yaitu partisipasi.



Gambar 1. Tampilan Website Penganggaran Elektronik

Akuntabilitas dalam hubungan agen dan prinsipal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuatu sesuai dengan arahan prinsipal. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas (Mardiasmo, 2006). Cooper & Ijiri (1984) mendefinisikan akuntabilitas menjadi dua bagian. Pertama, kewajiban agen, untuk menyediakan laporan yang memuaskan, secara periodik atas tindakan atau kegagalan atas wewenang yang telah didelegasikan.

Kedua, pengukuran pertanggungjawaban atau kewajiban dengan yang lainnya, mengekspresikan dalam unit moneter, properti, atau dasar pengukuran lain. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa ada dua jenis akuntabilitas publik yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang paling tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan kepada pemerintah pusat sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya dan menerima penjelasan atas sumberdaya yang diberikan tanggungjawabnya (Rohma, 2023). Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan (Rohma et al., 2023).

Loina (2003) menjelaskan bahwa terhadap beberapa tahapan sebuah program, akuntabilitas mulai dari proses pembuatan sebuah keputusan dan sosialisasi kebijakan. Dari prinsip akuntabilitas, adanya sebagai sebuah media penyampaian dan penyalur informasi selama penganggaran dengan melalui penganggaran elektronik (*e-budgeting*) yang bisa diakses seluruh pihak dimungkinkan dapat memenuhi kriteria akuntabilitas. Dengan demikian, adanya penganggaran elektronik penting untuk diperhatikan karena berpotensi mendorong akuntabilitas pemerintah. Peningkatan akuntabilitas organisasi berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pemanfaatan *e-budgeting* di pemerintah daerah dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sisem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom (Sosiawan, 2008). Pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi dengan cara mengunggah dokumen publik kepada masyarakat melalui situs web ataupun jaringan yang diketahui oleh khalayak umum agar kedua belah pihak (pihak agen dan prinsipal) dapat memberikan *feedback* ataupun memperoleh manfaat atas informasi yang

tersedia. Pemerintah daerah yang diberikan tanggungjawab oleh masyarakat untuk mengelola aset daerah seyogyanya dapat melaksanakan dan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan transparansi. Penganggaran merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang membutuhkan umpan balik dan transparansi dalam pelaksanaannya. Indrajit (2007) menjelaskan bahwa salah satu kriteria transparansi yang dapat dijadikan panduan adalah banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan seperti keterbukaan anggaran.

Informasi yang telah terunggah melalui dunia maya merupakan informasi yang menjadi barang publik yang berarti jika dikonsumsi oleh satu pihak maka manfaat tersebut tidak akan berkurang jika dikonsumsi oleh pihak lain (Rohma & Zakiyah, 2022). Selaknya, informasi lainnya, anggaran yang diberikan dalam bentuk informasi pada panel masing-masing web merupakan hal yang menjadi barang publik, tidak ada hal yang dikurangi atas hal tersebut. Berdasarkan perspektif teori keagenan (Jensen & Mckling, 1976), adanya ketersediaan informasi mengenai penggaran dengan *e-budgeting* yang bisa diketahui semua pengguna dapat mengurangi adanya ketidakpastian akan terjadinya *misleading information* dan asimetri informasi. Informasi yang ada kemudian dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat untuk memberikan penilaian berupa *judgment* dan evaluasi akan kinerja pemerintah daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini melakukan telaah mengenai urgensi implementasi penganggaran elektronik di pemerintah daerah. Perkembangan teknologi yang semakin massif yang digunakan dalam suatu organisasi dinilai dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan perilaku disfungsional. Penganggaran elektronik merupakan salah satu implementasi teknologi yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. Adanya *e-budgeting* dapat digunakan sebagai sarana untuk

Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong kepercayaan publik. *E-budgeting* juga berpotensi meminimalkan terjadinya asimetri informasi karena dapat mendorong terjadinya penganggaran partisipatif. Ketercapaian *e-budgeting* sangat bergantung pada berbagai aspek dari sumberdaya manusia hingga sarana yang memadai.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pentingnya implementasi *e-budgeting* untuk meminimalkan potensi konflik keagenan yang ada di pemerintahan. Akan tetapi, penelitian ini terbatas hanya mempertimbangkan ranah sistem dan teknologi informasi dari sisi penganggaran yaitu *e-budeting*. Penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan kajian konsep yang lebih luas dengan memperhatikan peran sistem dan teknologi informasi secara komperhensif yaitu *e-government*

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2004). *Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Anggarini, Yunita & Puranta, B. Hendra. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komperhensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Atkinson., Kaplan Matsumura & Young. (2012). *Management Accounting Sixth Edition*. USA: Pearson Education, Inc.
- Bastian. (2003). *Perkembangan e-government di Indonesia*. diakses melalui www.bappenas.go.id
- Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). *Kohler Dictionary of Accountant*, (6th ed.). New Delhi: Prentice hall of India.
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1): 53-64.
- Hardjaloka, Loura. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3(3).
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang, Penerbit UNDIP
- Hogye M. (2002). *Theoretical approaches to public budgeting*, M. Hogye (ed.), Local government budgeting, Open Society Institute
- Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kusufi, M. S., Rohma, F. F., & Muhammad, E. (2020). Pengaruh Horizon Skema Turnamen dan Frekuensi Publikasi Informasi Relatif terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 1-12. 280-287.
- Loina, Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nofianti, Leny dan Suseno, Novie Susanti. (2014). *Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability*. International Conference on Accounting Studies Kuala

- Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan Lumpur, Malaysia
- Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pohan, Max H. (2000). Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (*Local Good Governance*) dalam Era Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada *Musyawahar Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga*, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000
- Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1): 37-46
- Rohma, F. F. (2023). Does a green economy mentality exist? An experimental study in emerging country. *Asian Journal of Business Ethics*, 1-20.
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13.
- Rohma, F. F., & Tyastutik, H. (2023). Urgensi Pola Desain Kompensasi Moneter Berbasis Kombinasi Anggaran Dan Piece-Rate Untuk Optimalisasi Kinerja Guru: Studi Pada Institusi Berbasis Yayasan. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 3(1), 118-132.
- Rohma, F. F., & Zakiyah, R. D. (2022). The Moderating Effect of Proactive Personality On Role Ambiguity And User Satisfaction: An Experimental Under Technostress Condition. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(3),
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Rohma, Frida, Fanani., & Zakiyah, Rahayu. Dewi. (2022). The Moderating Effect of Proactive Personality On Role Ambiguity And User Satisfaction: An Experimental Under Technostress Condition. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(3): 280-287.
- Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role?. *International Journal of Business Science & Applied Management*, 17(3).
- Sadjiarto, Arja. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2(2): 138-150
- Sari, Kusuma Dewi Arum dan Wahyu Agus Winarno. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. *JEAM* 11(1).
- Setyorini, Ninik, Handoko A. Hasthoro, & Agung Wicaksono. (2013). Partisipasi Anggaran pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 4(2):137-148.
- Srivastava, Shirish C. (2016). You Can't Bribe a Computer: Dealing with The Societal Challenge of Corruption Through ICT. *MIS Quarterly*, 40(2): 511-526.
- Suparmoko. 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Tumpal, Melanthon dan Tumpak Simangunsong. (2015). Implementasi E-Budgeting: Wujud Berjalannya *Good Governance*. *Tinjauan Ekonomi & Keuangan* 5(4).
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Vazquez, Jorge. Martinez, Arze Del Granado & Jamezon Boex. (2012). *Fighting Corruption in The Public Sector*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier
- Wolk, Harry. I., James. L. Dodd, & John. J. Royzycki. (2013). *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. California: SAGE Publication.

